



Judul : Hergun Usul Proyek KCJB Dimoratorium
Tanggal : Selasa, 16 November 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Hergun Usul Proyek KCJB Dimoratorium

ANGGOTA Komisi XI DPR Heri Gunawan mengusulkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dimoratorium.

“Proyek KCJB lebih baik dimoratorium dulu untuk dilakukan audit dan kajian yang lebih komprehensif layak tidaknya proyek ini menggunakan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” usul Hergun-sapaan Heri Gunawan, dalam keterangan persnya, kemarin.

Anggota Fraksi Gerindra ini menjabarkan alasannya. Pertama, penggunaan APBN sebagaimana dinyatakan dalam Perpres 93/2021 perlu dikaji. Sebab, awalnya proyek ini tidak menggunakan APBN.

Kedua, pembengkakan biaya KCJB yang mencapai 8 miliar dolar AS atau sekitar Rp 114,4 triliun juga perlu diaudit. Karena sudah melebihi hitungan pihak Jepang sebagai inisiator proyek KCJB, yakni 6,2 miliar dolar AS.

Ketiga, perlu opsi pembiayaan selain suntikan APBN. Saat ini terjadi likuiditas yang melimpah. Dibuktikan dengan penjualan SBN (Surat Berharga Negara) yang melebihi target, dan dana masyarakat di perbankan juga melonjak signifikan.

Keempat, saat ini mobilitas masyarakat belum pulih akibat pandemi Covid-19, sehingga tidak perlu terburu-buru menyelesaikan pembangunan KCJB.

Menurut Hergun, banyak proyek infrastruktur yang tidak maksimal penggunaannya. Antara lain, Bandara Internasional Kertajati, Bandara JB Soedirman Purbalingga, Kereta Bandara Soekarno-Hatta dan LRT Palembang.

“Percepatan proyek KCJB jangan sampai hanya menambah daftar proyek-proyek yang

tidak maksimal pemanfaatannya,” wanti-wanti Hergun.

Dia menyarankan, lebih baik menunggu ekonomi benar-benar membaik, sehingga daya beli masyarakat pulih dan mampu membeli tiket KCJB. Pasalnya, dengan harga tiket diperkirakan Rp 250 ribu hingga Rp 350 ribu, saat ini dirasa masih berat.

“Dikhawatirkan, negara harus nombok lagi untuk mensubsidi operasional KCJB” ujar Hergun.

Karena itu, menurut dia, penggunaan APBN untuk mengatasi pembengkakan biaya proyek KCJB kurang tepat. Apalagi dari segi investasi, bukan investasi yang memberikan keuntungan secara cepat.

KCJB juga dianggap kurang ekonomis, karena stasiun terakhir terletak di pinggiran Kota Bandung, yakni Stasiun Tegalluar. “Penumpang masih harus berganti moda transportasi untuk menuju ke tengah kota,” katanya.

Menurut Hergun, rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur, tentu sedikit banyak akan mengurangi mobilitas warga Bandung ke Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani di hadapan Komisi XI DPR mengatakan, akan memberikan PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk proyek KCJB sebesar Rp 4,3 triliun. Dana tersebut akan diambil dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) APBN 2021.

PMN tersebut sebagai upaya penyelamatan terhadap proyek KCJB yang mengalami pembengkakan biaya. Pada awalnya, proyek tersebut diperhitungkan membutuhkan Rp 86,5 triliun. Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun, membengkak Rp 27,09 triliun. ■ KAL